

INVENTARISASI PENGAJIAN PRODUK HUKUM TAHUN 2020

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
1.	<p>a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah</p>	Dinas Kesehatan dan Biro Kesra SETDA	Perlunya integrasi pengaturan Pada Pergub Nomor 61 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 17 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas dan Tim Koordinasi Pemberantasan Obat dan Makanan, sehingga dapat berjalan efektif dan efisien baik dari sisi anggaran, SDm dan penyederhanaan produk hukum daerah	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0001222 tanggal 20 Januari 2020 2019 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017 dan Nomor 17 Tahun 2019

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
2.	<p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengeleolaan Aset Desa;</p> <p>b. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pendidikan (contoh : Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja direktorat Pembinaan SMK Nomor 1128/D5.4/KU/2019</p>	Dinpermasdes dan Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka penyelesaian aset tanah kas desa yang diatasnya berdiri bangunan SMA/SMK/SLB, terhambat pelaksanaannya karena adanya pengaturan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan tanah kas desa harus dilakukan dengan mekanisme hibah atau sewa. - Perlu mengusulkan kepada Mendagri untuk perubahan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 agar dapat mengakomodir mekanisme lain dalam rangka penyelesaian tertib administrasi tanah kas desa yang diatasnya 	<p>Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada :</p> <p>a. Menteri Dalam Negeri RI Nomor 180/0002338 tanggal 7 Pebruari 2020 perihal usul Perubahan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016;</p> <p>b. Surat Sekretaris Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 180/0002339 tanggal 7 Pebruari 2020 perihal usul Penyederhanaan persyaratan dalam rangka pemberian bantuan</p>

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>telah berdiri SMA/SMK/SLB melalui mekanisme hibah atau pinjam pakai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu dilakukan usulan penyederhanaan persyaratan aturan mengenai petunjuk pelaksanaan bantuan Pemerintah Pusat kepada sekolah baik berupa bangunan fisik (pembangunan ruang praktik siswa, ruang kelas baru, renovasi bangunan sekolah) dan DAK Fisik, cukup mensyaratkan surat keterangan dari penyelenggara kewenangan pengelolaan SMA/SMK/SLB dan Kepala Desa setempat 	
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa	DPMPTSP dan	Perlu dilakukan	Surat Sekretaris Daerah

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah	Biro Perekonomian	penyesuaian terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. perkembangan regulasi khususnya <ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 23 Tahun 2014 2) PP Tahun 24 Tahun 2018 3) Pepres 97 Tahun 2014 4) Perpres Nomor 44 Tahun 2016 5) Perpres Nomor 79 Tahun 2019 b. Hal-hal teknis seperti Perkembangan kebijakan investasi 	Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0005827 tanggal 13 Maret 2020 perihal Hasil Kajian Perda Nomor 7 Tahun 2010
4.	a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan	DKP Biro Isda BAPPEDA	Perlu dilakukan penyesuaian, harmonisasi dan dinkronisasai terhadap:	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0006493

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	<p>Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah</p>		<p>a. perkembangan regulasi khususnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 1 Tahun 2014 2) UU Nomor 23 Tahun 2014 3) Perda Nomor 7 Tahun 2018 4) Perda Nomor 13 Tahun 2018 5) Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 <p>b. Hal-hal teknis seperti Perkembangan keadaan khususnya kebijakan investasi</p>	<p>tanggal 23 Maret 2020 perihal Hasil Kajian Perda Nomor 9 Tahun 2009</p>
5.	<p>a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah</p> <p>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>	<p>a. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah khususnya yang menatur kebijakan daerah khususnya dalam penanganan penyakit menular di masa pandemic dan penekanan sanksi dalam penanggulangan</p>	<p>Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0008528 tanggal 15 Juni 2020 perihal Hasil Kajian Perda Nomor 11 Tahun 213 dan Pergub Nomor 36 Tahun 2014</p>

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah		<p>penyakit menular</p> <p>b. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur khususnya yang mengatur kebijakan daerah khususnya dalam penanganan penyakit menular di masa pandemic dan penekanan sanksi administrasi dalam penanggulangan penyakit menular khususnya terkait covid 19 serta perlunya ditetapkan Keputusan Gubernur terkait adanya perkembangan jenis penyakit baru yang mungkin timbul sebagai amanat Pasal 7 huruf a dan Pasal 14 Perda Nomor 11 Tahun 2013</p>	
6.	Peraturan Gubernur Jawa	Biro Hukum	Perlu dilakukan	Nota Dinas Kepala Biro

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	Tengah Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Oemerintah Provinsi Jawa Tengah		<p>penyesuaian sehubungan dengan:</p> <p>a. adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015; 	Hukum Nomor...

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>b. adanya perkembangan keadaan yaitu kebutuhan dalam pengelolaan tugas pokok dan fungsi penyusunan produk hukum daerah antara lain terkait dengan Jejaring Penyusunan Produk Hukum Daerah dan aplikasi penyusunan produk hukum daerah berbasis teknologi informasi.</p>	
7.	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Dinas ESDM</p>	<p>Perlu dilakukan penyesuaian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun</p>	<p>Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0009680 tanggal 9 Juli 2020 perihal Hasil Pengkajian Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011</p>

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana kewenangan bidang mineral dan batu bara beralih ke Pemerintah Pusat	
8.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019	Biro Perkenomian	<p>perlu dilakukan peninjauan kembali dan penyesuaian terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2013 dikarenakan perkembangan peraturan perundang-undangan dan hal teknis lainnya dengan memperhatikan:</p> <p>a. Proses penetapan Peraturan Daerah yang mengatur penyesuaian bentuk hukum beberapa BUMD;</p> <p>b. ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang menyatakan bahwa Perda Penyertaan Modal ditetapkan sebelum</p>	Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21/s.k/Hk/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD, mengingat Perda Nomor 14 Tahun 2013 merupakan perencanaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2023	
9.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebagai tindak lanjut dan peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hal-hak teknis lainnya di	Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20/s.k/Hk/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			bidang kerja sama daerah	
10.	a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah	BPKAD	Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan daerah: a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; yang berpengaruh terhadap pengaturan dalam penganggaran dan	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0012611 tanggal 14 September 2020

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			penatausahaan pemberian hibah/bansos/bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, maka perlu penyesuaian atas beberapa kebijakan/regulasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah	
11.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah	Dinpermasdesd ukcapil	Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan daerah: d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021; f. Peraturan Menteri Dalam	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0012611 tanggal 14 September 2020

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;</p> <p>yang berpengaruh terhadap pengaturan dalam penganggaran dan penatausahaan pemberian hibah/bansos/bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, maka perlu penyesuaian atas beberapa kebijakan/regulasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah</p>	
12.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan	Biro Administrasi Bangda	Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan daerah: g. Peraturan Pemerintah	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0012611 tanggal 14 September 2020

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	<p>Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018</p>		<p>Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021;</p> <p>i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;</p> <p>yang berpengaruh terhadap pengaturan dalam penganggaran dan penatausahaan pemberian hibah/bansos/bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan akan dilaksanakan pada Tahun</p>	

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>Anggaran 2021, maka perlu penyesuaian atas beberapa kebijakan/regulasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah</p>	
13.	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin</p>	<p>Biro Hukum</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian dengan:</p> <p>a. perkembangan peraturan perundang-undangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 	<p>Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0013917 tanggal 9 Oktober 2020</p>

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.</p> <p>b. hal-hal teknis terkait pemberian bantuan hukum, antara lain meliputi:</p> <p>1) perluasan pemberian bantuan hukum tidak hanya kepada masyarakat miskin, namun demikian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 91 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemberian bantuan hukum dapat diperluas kepada kelompok rentan penyandang disabilitas;</p> <p>2) Pengaturan ruang lingkup dalam Pasal 4 memuat garis besar substansi Bab per Bab</p>	

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>dalam Peraturan Daerah;</p> <p>3) Perluasan penyelenggaraan bantuan hukum khususnya pada aspek non litigasi dan penyediaan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4) Pengaturan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin</p>	
14.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Dinpermasdesd ukcapil	Perlu dilakukan penyesuaian sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/00144211 tanggal 19 Oktober 2020

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
15.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa substansi dalam mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang perlu diatur dan disesuaikan	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0015168 tanggal 3 Nopember 2020